

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kinerja Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Keuangan Daerah

Pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah yaitu segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan daerah dengan uang sebagai alat, dan segala sesuatu di dalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut UU nomor 23 Tahun 2014, Keuangan Daerah yaitu segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan, segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut.

2.1.1.2 Tujuan Keuangan Daerah

Menurut Khusaini (2018: 2), Tujuan diaturnya Keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Singkatnya, dapat disebutkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu bentuk dari pencapaian Pemerintah Daerah dalam sektor keuangan adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.1.1.3 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut Abdul Halim (2016:24), “Kinerja Keuangan Daerah adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.”

Patriati (dalam Siti Nur Rochmah, 2015) “Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD”.

2.1.1.4 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Teknik analisis pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan analisis rasio laporan keuangan.

Mahmudi (dalam Ririn, 2021: 2), “analisis rasio keuangan adalah suatu alat analisis yang menghubungkan atau memperbandingkan suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, serta mengidentifikasi hubungan antara keduanya.” Windhu Putra (dalam Ririn, 2021: 2) menjelaskan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dinilai dengan analisis rasio keuangan pada APBD, dimana salah satu rasio yang dapat digunakan adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan Kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pelayanan, pembangunan secara

mandiri kepada masyarakat melalui pemungutan pajak serta retribusi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap Dana Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Menurut Mahmudi (2015) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung menggunakan cara perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Transfer.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Berikut keterangan komponen perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diperoleh dari bantuan pihak luar (eksternal) kepada daerah, diklasifikasikan menjadi:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat adalah pendapatan transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah yang terdiri dari Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus), Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan serta Dana Desa.

b. Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah adalah pendapatan transfer yang bersumber dari Daerah Lain, terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0 – 25	Rendah Sekali	Instruktif
25 – 50	Rendah	Konsultatif
50 – 75	Sedang	Partisipatif
75 – 100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Tim Litbang Depdagri dalam Oki (2022)

Adapun keterangan mengenai pola hubungan Kemandirian Keuangan Daerah antara lain:

1. Pola hubungan Instruktif yaitu peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada Kemandirian Pemerintah Daerah. Daerah tidak mampu melaksanakan Otonomi Daerah.
2. Pola hubungan Konsutatif yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Pola hubungan Partisipatif yaitu peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi Pemerintah Pusat.
4. Pola hubungan Delegatif yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Hamid, Edy Suandi (2007: 43) “Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan (PDB) tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk biasanya dikaitkan dengan tingkat pembangunan ekonomi, atau bahkan tidak jarang dianggap hal yang sama”.

Faktor yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia tidak luput dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, dimana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih besar dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum yaitu:

1. Faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin.
2. Faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar.
3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah.
4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus di antisipatif dan diterima pasar.

2.1.2.2 Masalah Pertumbuhan Ekonomi

Kebanyakan negara berkembang menghadapi banyak masalah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hambatan-hambatan terutama yang dialami adalah:

1. Kegiatan sektor pertanian masih tetap tradisional dan produktivitasnya sangat rendah.
2. Kebanyakan negara masih menghadapi masalah kekurangan dana modal dan barang modal (peralatan produksi) yang modern.
3. Tenaga terampil, terdidik dan keahlian keusahawanan penawarannya masih jauh dibawah jumlah yang diperlukan.
4. Perkembangan penduduk sangatlah pesat.
5. Berbagai masalah institusi, sosial, kebudayaan dan politik yang sering dihadapi.

Beberapa teori telah dikemukakan yang merangkan mengenai hubungan diantara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan teori tersebut adalah:

1. Teori klasik: menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Akan tetapi yang terutama diperhatikan ahli ekonomi klasik adalah peranan tenaga kerja. Menurut mereka tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
2. Teori Schumpeter: menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

3. Teori Harrod-Domar: menekankan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan.
4. Teori neo klasik: melalui kajian empirikal teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.3 Kebijakan Pemerintah tentang Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah:

1. Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi: Memodernkan kegiatan ekonomi yang ada dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru dan mempercepat informasi kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional kepada kegiatan ekonomi yang modern.
2. Mengembangkan infrastruktur: Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur yang berkembang, seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi dan penyediaan air, listrik dan jaringan telepon.
3. Meningkatkan tabungan dan investasi: Kekurangan investasi selalu dinyatakan sebagai salah satu sumber yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan tabungan masyarakat.
4. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat: Individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih

tinggi, jadi semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh.

5. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi: Kebijakan pemerintah yang konvensional yaitu kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan tetapi melalui perencanaan pembangunan dapat mencapai suatu tujuan pertumbuhan yang telah ditentukan.

2.1.2.4 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Anonymous (dalam Nina, Fitri, 2017:6) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat yang meningkat. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan dua metode pendekatan yakni:

1. Pendekatan Produksi: Pendekatan nilai tambah dimana Nilai Tambah Bruto (NTB) diperoleh dengan cara mengurangi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya dari masing-masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit

produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan: Pendekatan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung netto. Jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membanding tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Nordiawan (dalam Anidar, Novia 2009:11), menyatakan bahwa belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap

pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

2.1.3.2 Kategori dan Jenis Belanja Modal

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Kategori belanja modal menurut Ghozali (2008) adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dapat menambah aset Pemda.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah diatur atau ditetapkan oleh Pemda.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Menurut Halim dan Abdullah (dalam Anidar, Novia 2019:12), jenis-jenis belanja modal, terdiri dari:

1. Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya

sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatandan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatandan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik lainnya Belanja Modal Fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan /penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal. Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal

kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.4 Investasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 52 Tahun 2012 menyebutkan bahwa investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah
2. Meningkatkan pendapatan daerah
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sukirno (dalam Andardani, 2019 :15) “kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat untuk terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat”.

Dengan adanya Investasi Daerah, membantu daerah tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat membuat daerah itu tidak bergantung pada pemerintah pusat (mandiri).

Berikut dipertegas dalam penelitian Andardani (2019) yang menunjukkan bahwa Investasi Daerah yang diukur dari rasio realisasi belanja modal terhadap PDRB nominal provinsi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan Pemerintah daerah.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya Periode 2015-2019. Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah pada halaman selanjutnya:

2.2 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nina dan Fitri (2017) “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara”	Dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: -Pertumbuhan Ekonomi -Pendapatan Asli Daerah	Dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: - Pertumbuhan Ekonomi	Independen: -Pendapatan Asli Daerah	-Hasil penelitian secara simultan dan parsial menunjukkan (X1), (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap (Y). -Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin baik pula Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2	Neni dan Amir (2020) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	Dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: -Pertumbuhan Ekonomi -Ukuran Pemerintah Daerah	Dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: - Pertumbuhan Ekonomi	Independen: -Ukuran Pemerintah Daerah	-Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota se Wilayah Jawa Barat yang diukur dengan Rasio Kemandirian, yang artinya dapat

					diakibatkan oleh naik turunnya kedua variable (X) tersebut.
3	Asnidar dan Hardi (2019) “Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa”	Dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: -Belanja Modal	Dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: -Belanja Modal		-Secara parsial (Uji t) Belanja modal diperoleh nilai prob t statistik < 5% (0,01 < 0,05) dapat dinyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Kota Langsa. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan ”diduga belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kota Langsa” dapat diterima.
4	Ni Putu dan Ida Bagus (2018) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	Dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: -Pendapatan Asli Daerah -Belanja Modal	Dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: -Belanja Modal	Independen: -Pendapatan Asli Daerah	- Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. - Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5	Siti Eka Resti Andardini (2019) “Pengaruh Dana Bergulir, Investasi Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”	Dependen: - Kemandirian Keuangan Daerah Independen: -Dana Bergulir -Investasi Daerah -Produk Domestik Regional Bruto -Belanja Modal	Independen: -Investasi Daerah -Belanja Modal	Dependen: - Kemandirian Keuangan Daerah Independen: -Dana Bergulir -Produk Domestik Regional Bruto	- Hasil uji secara parsial yaitu investasi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana bergulir, PDRB, dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. - Hasil uji secara simultan yaitu dana

					bergulir, investasi daerah, PDRB, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah.
6	Mochammad Amri (2015) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, Investasi Pemerintah Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Daerah (Studi Empiris pada Kota/Kabupaten Bandung di Wilayah Provinsi Jawa Barat)”	Dependen: - Kemandirian Keuangan Daerah Independen: -Pendapatan Asli Daerah -Transfer Pemerintah Pusat -Investasi Pemerintah Daerah -Pertumbuhan Ekonomi	Independen: -Investasi Pemerintah Daerah - Pertumbuhan Ekonomi	Dependen: - Kemandirian Keuangan Daerah Independen: -Pendapatan Asli Daerah -Transfer Pemerintah Pusat	- Hasil penelitian secara parsial dan simultan seluruh Variabel (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel (Y)
7	Ririn Trisdayanti (2021) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”	Dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: -Jumlah Tenaga Kerja -Belanja Modal -PDRB	Dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: -Belanja Modal	Independen: -Jumlah Tenaga Kerja -PDRB	- Jumlah Tenaga Kerja, Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. - Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
8	Siti Nur Rochmah (2015) “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	Dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen:	Dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen:	Independen: -PAD -Dana Perimbangan -Leverage	-Berdasarkan hasil uji R ² , variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAPER), Belanja Modal (BM),

		-PAD -Dana Perimbangan -Belanja Modal -Pertumbuhan Ekonomi -Ukuran Legislatif -Leverage	-Belanja Modal - Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Ukuran Legislatif (LEGISLATIF) dan Leverage (LEV) proporsinya cenderung kurang dominan dalam mempengaruhi kisaran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KINERJA) yaitu hanya 88,2%.
9	Syauqih dkk (2017) “Strategi Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor dalam Pengelolaan APBD”	Dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: -Investasi -Pendapatan Per Kapita -Pajak Daerah -PDRB.	Dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: -Investasi	Independen: -Pendapatan Per Kapita -Pajak Daerah -PDRB.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial: Investasi, Pendapatan Per Kapita, dan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. PDRB berpengaruh 28egative dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
10	Satri dan Rifki (2018) “Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat”	Dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: -Belanja Modal -Dana Alokasi Umum -Dana Alokasi Khusus dan -Pendapatan Asli Daerah	Dependen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Independen: -Belanja Modal	Independen: -Dana Alokasi Umum -Dana Alokasi Khusus dan -Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Investasi Daerah merupakan beberapa faktor yang turut memengaruhi perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.

Hubungan antara ketiga faktor tersebut dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya adalah pada halaman selanjutnya:

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang mengarah pada peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendapatan daerah yang harus dipacu pertumbuhannya. Pemerintah daerah dengan pendapatan yang besar diharapkan mampu memberikan kinerja yang baik. Jadi dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan besarnya tingkat potensi daerah maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Penelitian Neni dan Amir (2020) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.2.2 Hubungan Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Pemerintah dengan

aset yang besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan sarana serta prasarana yang ada di daerah yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka akan berpengaruh pada tingkat produktivitas ekonomi yang semakin meningkat, dan dengan adanya dukungan infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk menempatkan dana investasinya di daerah tersebut. Hal tersebut mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan faktor utama dari kemandirian keuangan daerah.

Menurut Asnidar dan Novia (2019) Mengatakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.2.3 Hubungan Investasi Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Investasi daerah adalah kegiatan pemerintah yang menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semakin meningkatnya investasi daerah maka semakin tingginya PAD. Semakin tingginya PAD menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat dikategorikan mandiri.

Menurut Penelitian yang telah dilakukan oleh Andardini (2019) menunjukkan bahwa Investasi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah.

Pertumbuhan
Ekonomi

Belanja Modal

Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah

Investasi Daerah

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang sebelumnya telah dipaparkan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan penulis adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan investasi daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kota Tasikmalaya periode 2009-2018?
2. Diduga secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan investasi daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kota Tasikmalaya periode 2009-2018?